

PERANAN KEPALA ADAT
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU WOMBONDA
UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUPIORI
PROVINSI PAPUA



ROBY HERMAN MNIBER
No. Mhs : 115201603/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : ROBY HERMAN MNIBER
Nomor Mahasiswa : 115201603/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua

§
Nama Pembimbing Tanggal Tanda Tangan

Prof.Dr.Dra. MG.Endang Sumiarni, SH., M.Hum. 4-1-2013 

S.W.Endah Cahyowati, SH., M.S. 4-1-2013 



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ROBY HERMAN MNIBER
Nomor Mahasiswa : 115201603/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesisi : Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

Nama Penguji Tanggal Tanda Tangan

Prof.Dr.Dra. MG.Endang Sumiarni, SH., M.Hum.

4-1-2013

Ketua

S.W.Endah Cahyowati, SH., M.S.

4-1-2013

Anggota

Dr. Woro Murdiati, SH., M.Hum.

4-1-2013

Anggota

4-1-2013

Ketua Program Studi

B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesis ini, dengan judul: Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayatn Suku Wombondauntuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua, merupakan karya asli Penulis, dan bukan merupakan hasil plagiasme. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan tesis ini maka, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28Januari 2013

Penulis,

Roby Herman Mniber

INTISARI

Penelitian dengan judul Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda untuk mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian sengketa tanah ulayat Suku Wombonda untuk mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dan non hukum dari literatur dan pendapat dari para nara sumber tentang peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Metode pengumpulan data melalui wawancara dan Studi Kepustakaan. Analisis datameliputi deskripsi, sistematisasi, analisis, iterpretasi, dan menilai hukum positif.

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwaDalam kehidupan Suku Wombonda apabila terjadi sengketa tanah ulayat maka diselesaikan melalui Kepala Adat *manawir*. Peranan Kepala Adat adalah, menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Kepala Adat *manawir* bertugas untuk menerima, melaksanakan dan membetulkan hukum yang telah dilanggar dengan maksud mengembalikan citra hukum adat.Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Kepala Adat, norma-norma hukum adat dan keputusan-keputusan Kepala Adat yang mempunyai otoritas sehingga menjadi hukum adat dan mengikat.

Kata kunci: Peranan Kepala Adat, Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Kepastian hukum

ABSTRACT

This study with the title of The Role of Traditional Chief in the Settlement of Customary Land Disputes among Wombonda Tribe to Achieve Legal Assurance in SupioriRegency, Papua Province. The purpose of the study is to find out analyze the role of traditional chief in the settlement of customary land dispute among Wombonda tribe to achieve legal assurance in SupioriRegency, Papua Province.

The study was conducted by a normative legal method using literatures or secondary data. Primary legal materials include regulations, while secondary legal materials provide explanation on the primary legal materials. The primary legal materials were legal opinions and non-legal materials from literatureand opinions from informants on the role of traditional chief in the settlement of customary land disputes. Data were collected through interview and literature study. Data analysis was done to make description, systematization, analysis, interpretationand positive legal assessment.

Based on the results of the study, it can be concluded that in the context of Wombonda tribe's life, customary land disputes were usually settled by traditional chief (*manawir*). The role of traditional chief is to keep harmony in a social life. The traditional chief (*mananwir*)serves to accept, execute, and improve the norms violated in terms of recovering the image of customary law. Legal assurance in the settlement of customary land disputes provided by the traditional chief is based on acts, customary legal norms, and decisions issued by the traditional chief with an ultimate authority making them the binding customary norms.

Keywords: The role of traditional chief in the settlement of customary land disputes and legal assurance

HALAMAN PERSEMBAHAN

*"Sebab di dalam Dia lah tersembunyi segala harta, nikmat
dan pengetahuan(Kolose 2. 3)"*



*,, Jika kamu berhasrat untuk berjaya, jangan
hanya memandang ke tangga tetapi belajarlah
untuk menaiki tangga tersebut.*

*Ku persembahkan untuk sumber inspirasi kuyang berbahagia
ataskeberhasilan ku*

"BAPA ,,,, MAMA "
*ISTRI dan ANAK ANAK TERCINTA serta
SAUDARA SAUDARA KU.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

Penulisan hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk yudisium. Penulis berpendapat bahwa banyak pengalaman berharga dalam penulisan hukum tesis ini. Penulis belajar bersabar bagaimana harus memilih dan menentukan judul yang tepat, melakukan penelitian, mengumpulkan data-data untuk dikaji dalam sebuah penulisan hukum. Penulis menyadari betul penulisan ini dapat diselesaikan kerena penulis banyak memperoleh bantuan,dorongan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, berbagai pihak lainnya yang juga memberikan bantuannya dengan rahmat yang berasal dari Tuhan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. R. Maryanto., MA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Riawan Tjandra., SH, M.Hum, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak. B Bambang Rianto., SH, M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Fredrik Menufandu., Selaku Bupati Kabupaten Supiori yang telah memberikan kesempatan kepada penulis selaku pegawai negeri sipil untuk menimba ilmu guna pengembangan aparatur pemerintah, di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni., SH, M.Hum, selaku Dosen pembimbing tesis, penulis berterima kasih atas masukan-masukan serta arahan kepada penulis.
6. Ibu. SW.Endah Cahyowati., SH, M.S selaku Dosen pembimbing tesis, penulis berterima kasih atas masukan-masukan serta arahan kepada penulis.
7. Semua dosen dan karyawan Program Pascasarjana Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih untuk dedikasi Bapak Ibu dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak Samuel Sauyas., SH, M.Si, selaku Kepala Adat (*Mananwir*)mun Supiori yang telah banyak membantu memberikan data-data mengenai sengketa tanah yang terjadi pada Suku Wombonda di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.
9. Bapak Esau Baab., selaku Kepala adat bidang peradilan adat (*Mananwir*)mun Supiori yang telah banyak membantu memberikan data-data mengenai sengketa tanah yang terjadi pada Suku Wombonda di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.
10. Bapak Daud Swom., selaku Kepala Adat (*Mananwir*)mun Supiori

11. Bapak Stevanus Sarakan., selaku Kepala Adat bidang pemerintahan adat (*Mananwir)mun* Supiori yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta petunjuk pengarahan dalam rangka pengumpulan data di daerah Warbefondi di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.
12. Bapak, Bernadus Rumere., Selaku Kepala Desa Warbefondi yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta petunjuk pengarahan dalam rangka pengumpulan data.
13. Bapak, Yosia Rumere., Selaku Sekdes Warbefondi yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta petunjuk pengarahan dalam rangka pengumpulan data.
14. Teman-teman MIH, Max, Yosep, Lexi, Iksan, Yul, Enda, Meri, Fiertasari, Tomi, Cotto, Ramon, Emil, Aji, Budi, Ari, Agus, Egas, Feri, Lusi, Dian, Rigo.
15. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta dan menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih Tuhan melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 28 Januari 2013

Penulis,

Roby Herman. Mniber

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	12
2. Batasan Konsep	12
3. Keaslian Penelitian	15
4. Manfaat Penelitian	20
B. Tujuan Penelitian	21
C. Sistematika Penulisan.....	22
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kepala Adat	24
B. Hak Ulayat Atas Tanah	32
C. Tanah Ulayat Suku	36
D. Penyelesaian Sengketa	40
E. Kepastian Hukum	44
F. Landasan Teori	50
	xi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Jenis Data.....	54
D. Metode Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data.....	58
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 63
A. Gambaran Umum.....	63
1. Letak Geografis.....	63
2. Batas Bidang dan Sejarah Kepala Adat.....	65
3. Hubungan Masyarakat dengan Tanah Ulayat Adat.....	67
B. Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda.....	72
1. Jumlah Sengketa Tanah Ulayat.....	72
2. Faktor-faktor terjadinya Sengketa Tanah Ulayat.....	76
3. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.....	83
4. Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.....	90
C. Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda.....	97
1. Hukum Tertulis.....	97
2. Hukum Kebiasaan.....	98
3. Unsur-unsur Kepemimpinan.....	100
4. Teori Keputusan.....	102
5. Keputusan Kepala Adat.....	105
 BAB V PENUTUP	 111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	111
 DAFTAR PUSTAKA	 113
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

1. Data Konflik Tanah Ulayat Suku Wombonda Distrik Supiori Selatan..... 73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian Kepala Kampung Warbefondi Distrik Supiori Selatan.
- Lampiran 3. Peta Kabupaten Supiori
- Lampiran 4. Wawancara dengan Kepala Adat *Mananwir*
- Lampiran 5. Kepemilikan atas Tanah
- Lampiran 6. Batas Alam dan Tanah yang di sengketakan antara Marga Rumere dan woof